

Percakapan dengan

Lies Macoes-Natsir



Lies Macoes-Natsir, aktivis perempuan tamatan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN).

Sekularisasi dipilih para pendiri republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan tujuh kata di belakang sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya. Keindonesiaan kita sedang mendapat ancaman dari tiadanya demarkasi yang jelas antara wilayah privat (agama) dengan publik (negara). Maka, Indonesia harus mengambil langkah sekularisasi sebagai jawaban niscaya bagi penyelesaian masyarakat yang plural. Untuk itu dibutuhkan ketegasan menarik jarak dengan urusan primordial agar negara dapat bersikap adil kepada semua entitas warga yang berbeda. Kita membutuhkan suatu pandangan bersama semacam Pancasila dan aturan-aturan praktis yang mampu mewadahi keanekaragaman sekaligus melindungi keyakinan kita dari intervensi dan kepentingan politik.

Bagaimana Anda memandang sekularisme yang sering dipandang negatif oleh banyak kalangan?

Awal tahun 2006 saya diundang sekelompok perempuan yang, kata-kannya, sudah selesai secara ekonomi. Mereka umumnya lahir dan besar dari keluarga Muslim atau setidaknya Abangan. Bahkan sebagian anak-anak mereka menikmati lembaga pendidikan Islam modern dan elitis. Sesuatu yang tidak mereka rasakan tempo hari karena mereka umumnya sekolah di lembaga pendidikan Katolik atau swasta lainnya. Sebagian besar mereka atau suami mereka mungkin menikmati liberalisme ekonomi pada masa Orde Baru. Pendeknya mereka adalah ibu-ibu kelas mapan Jakarta.

Undangan bersifat informal itu dimulai dengan sebuah cerita. Rupanya mereka baru kembali dari Turki. Dalam tuturannya, mereka di sana menyaksikan sesuatu yang menurut mereka sangat mengagumkan, demikian mereka bercerita. Bukan sekadar alamnya yang indah, tetapi situasinya yang mengesankan sebagai kota peradaban Islam. Mereka berkesimpulan bahwa Turki telah berhasil membangun sebuah negara modern dengan tetap mencirikan sebuah negara sekular, tetapi dengan fondasi kebudayaannya (Islam) yang kuat. Keberhasilan ini, menurut mereka, karena Turki berhasil melalui proses sekularisasi.

Ketika mereka kembali ke tanah air, demikian lanjutan ceritanya, mereka seperti merasakan kegelisahan yang tak bisa dibuang dengan pergi tidur atau berlibur. Harap dicatat, ketika itu di Jakarta sedang terjadi perdebatan yang sangat hangat soal rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Masyarakat nyaris terbelah antara yang pro dan kontra. Hampir setiap minggu di jalan-jalan utama di Jakarta terjadi pawai dan demonstrasi yang menunjukkan polarisasi pendapat atas RUU itu.

Secara diametral para ibu “gedongan” ini mencoba membandingkan kondisi masyarakat Islam di sini dan di Turki. Menurut mereka, Islam di sini tak lagi ramah seperti di masa lalu. Setiap perbedaan seringsekalinya disikapi dengan kekerasan dan tindak anarkis. Mereka, sebagaimana Buya Syafii Maarif, demikian jengkel pada perilaku kampung halaman para “pembela Islam” yang datang ke kafe atau ke tempat ibadah agama lain dengan cara-cara kekerasan. Secara langsung tampilan para “preman berjubah” itu tampaknya telah mengganggu ketentraman kaum ibu yang merasa memiliki

Islam juga. “Biar begini, saya ini Muslim”, demikian biasanya mereka mengenalkan identitas dirinya.

Dari sini, diperoleh gambaran sederhana bahwa Islam di negara Indonesia telah mengalami proses fundamentalisme. Dan ini, bagi ibu-ibu, sangat mengkhawatirkan. Kebebasan yang selama ini mereka peroleh baik sebagai warga negara atau sebagai umat Islam, merasa terusik

oleh perilaku kalangan fundamentalis itu. Menurut mereka, Islam Indonesia saat ini telah menjadi suatu kekuatan dengan watak minoritas, meskipun pada kenyataannya mereka yang mayoritas bahkan dominan. Dengan watak minoritas dimaksud, kalangan tertentu merasa punya mandat untuk melakukan proteksi terhadap keyakinannya dan merasa punya wewenang untuk melakukan apa saja termasuk represi kepada kelompok lain yang dianggapnya bertentangan. Celakanya, dalam situasi itu negara malah

bungkam atau setidaknya tak kunjung tegas. Tidak salah jika negara bahkan dianggap tunduk pada perilaku sipil yang represif itu. Padahal sudah sangat jelas Islam Indonesia dewasa ini adalah kelompok mayoritas dan bahkan dominan. Di sisi lain, pluralitas Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Mengapakah sikap primordial Islam muncul, sementara mereka sendiri justru sang mayoritas? Mengapakah selalu muncul anggapan bahwa Islam sedang terancam sehingga harus melakukan tindakan apapun, termasuk kekerasan untuk membelanya? Bukankah untuk sebuah negara yang plural dibutuhkan sebuah ketegasan dalam menarik jarak dengan urusan primordial, sehingga negara dapat bersikap adil kepada semua entitas warga di negara ini? Menurut mereka, kita membutuhkan suatu pandangan bersama semacam Pancasila dan aturan-aturan praktis yang

Secara sederhana saya memaknai sekularisasi sebagai pemisahan ruang privat dan publik. Pemisahan sama sekali tidak berarti penghilangan apalagi pemusnahan agama.

Pemisahan artinya mendudukan ruang dan fungsi pada tempatnya. Urusan agama, dalam pemahaman saya dengan mengacu pada konsep sekularisasi, seharusnya masuk ke persoalan privat, urusan pribadi.

Sebab, spiritualitas adalah pengalaman pribadi.

mampu mewadahi keanekaragaman Indonesia, sekaligus melindungi keyakinan kita dari intervensi dan kepentingan politik. Contoh perda-perda yang diberi label “syariat Islam” yang pada intinya mengatur urusan-urusan perilaku personal dan bukan publik menjadi rujukan betapa bedanya kita dengan Turki.

Kesimpulan tentang kemajuan Turki boleh jadi benar, dalam beberapa hal, namun juga terlalu naif, untuk hal lain. Mereka tentunya tahu bahwa ketika sekularisasi menjadi “panglima”, represi yang dilakukan negara atas nama sekularisasi di Turki juga luar biasa. Kelompok Muslim tak memiliki kebebasan sedikitpun untuk menunjukkan kemusliman mereka di ruang publik. Perempuan Muslim mengalami kekerasan yang berlipat dibandingkan kaum lelakinya. Sebab selain ditekan negara, dalam situasi seperti ini mereka juga ditekan para pemuka agama agar patuh pada pandangan tradisional ihwal perempuan dalam agama seperti kewajiban menggunakan jilbab di ruang publik. Akibatnya, banyak dari mereka tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum atau bahkan harus berhenti bekerja.

Sebetulnya represi yang dilakukan negara pernah dialami kalangan Muslim di Indonesia pada masa awal Orde Baru. Islam politik benar-benar di tindas. Islam budaya dikerdilkan menjadi sekadar hiburan atau ritual tanpa ruh. Atas nama politik SARA, kepelbagaian haram untuk dibicarakan apalagi dipertentangkan. Konsep budaya rukun, sebuah cara pandang yang dicaplok mentah-mentah dari budaya Jawa, diterapkan dengan paksa ke seluruh penjuru negeri ini. Perbedaan direkayasa untuk dikelola menjadi harmoni yang juga diterapkan tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Pancasila yang seharusnya dapat menjadi ideologi terbuka, ditafsirkan tunggal oleh dan untuk kepentingan Orde Baru. Jadi, terlepas betapapun naifnya mengagungkan keberhasilan Turki dalam sekularisasi, menurut saya kegelisahan mereka tentang represi yang dilakukan kalangan agama kepada kelompok lain adalah sah adanya.

Sebenarnya apa yang Anda maknai dengan sekularisasi itu; apa bedanya dengan sekularisme? Relevankah gagasan tersebut buat Indonesia?

Secara sederhana saya memaknai sekularisasi sebagai pemisahan ruang privat dan publik. Pemisahan sama sekali tidak berarti penghilangan apalagi

pemusnahan agama. Pemisahan artinya mendudukkan ruang dan fungsi pada tempatnya. Urusan agama, dalam pemahaman saya dengan mengacu pada konsep sekularisasi, seharusnya masuk ke persoalan privat, urusan pribadi. Sebab, spiritualitas adalah pengalaman pribadi. Dari sisi historis, sekularisasi di Barat terjadi ketika

gereja pada Abad Pertengahan mendominasi kehidupan warganya. Segala sesuatu ditentukan dan diputuskan oleh gereja dan didasarkan pada rujukan yang subyektif, yaitu wilayah keyakinan. Mengambil kata Yunani *saekulum*, sekular artinya dunia; serba dunia. Sekularisme adalah pemikiran atau konsep yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Melalui usaha sekularisasi ini institusi gereja ditolak atau setidaknya dibatasi kehadirannya agar mereka tidak ikut *cawe-cawe* mengurus urusan publik. Wilayah gereja seharusnya terbatas hanya mengurus umat, dan karenanya bersifat domestik dan subyektif. Sementara urusan publik seharusnya diserahkan kepada negara dan karenanya mesti bersifat netral, objektif demi melindungi semua warganya terlepas dari apapun latar belakangnya baik secara sosial, etnis, gender dan keyakinannya.

Dominasi gereja memang tidak terjadi di negeri ini. Tapi kebutuhan untuk melakukan sekularisasi di Indonesia bagi saya adalah nyata. Berbeda dengan di Barat, yang kita butuhkan adalah menarik jarak dari fikih yang diformalkan menjadi peraturan-peraturan atau hukum positif. Fikih sebagai produk pemikiran ulama kebanyakan bersifat *khilâfiyah* (di dalamnya

Tentu saja tak semua produk fikih dikesampingkan dalam mengatur urusan publik. Undang-undang Perkawinan adalah satu contoh bagaimana produk pemikiran fikih diubah menjadi hukum positif. Seperti sebuah irisan diagram ven, Undang-undang perkawinan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai pandangan fikih di mana semua lingkaran-lingkaran pandangan yang berbeda-beda itu bersinggungan membentuk sebuah lingkaran dalam yang relatif bulat. Lingkaran dalam itulah yang kita namakan *masalah* atau kebaikan. Sejauh itu membawa kemaslahatan untuk semua, fikih atau hukum adat atau apapun bisa disodorkan sebagai sumber hukum yang kemudian diuji secara demokratis.

terdapat perbedaan pendapat). Sebuah hukum yang *khilâfiyah* seharusnya tak dipaksakan menjadi hukum positif yang kemudian menjadi makna tunggal. Aturan-aturan yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan, atau mengatur bagaimana perempuan sebagai warga negara harus bertingkah laku, tidak bisa dipaksakan oleh hanya satu mazhab dalam fikih.

Tentu saja tak semua produk fikih dikesampingkan dalam mengatur urusan publik. Undang-undang Perkawinan adalah satu contoh bagaimana produk pemikiran fikih diubah menjadi hukum positif. Seperti sebuah irisan diagram ven, Undang-undang perkawinan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai pandangan fikih di mana semua lingkaran-lingkaran pandangan yang berbeda-beda itu bersinggungan membentuk sebuah lingkaran dalam yang relatif bulat. Lingkaran dalam itulah yang kita namakan *mashlahah* atau kebaikan. Sejauh itu membawa kemaslahatan untuk semua, fikih atau hukum adat atau apapun bisa disodorkan sebagai sumber hukum yang kemudian diuji secara demokratis.

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya. Sebagai mayoritas, umat Islam waktu itu justru bersikap *legowo* untuk menghormati kepelbaggian di negeri ini. Mereka tidak *aji mumpung* sama sekali. Dengan menyadari bahwa agama dan adat adalah dua hal yang teramat penting dalam mengatur kebutuhan dan tata hubungan antar-umat beragama, maka sampai batas tertentu negara diberi wewenang untuk mengurusinya. Dan dengan melanjutkan tradisi birokrasi jajahan Belanda, urusan umat kemudian diserahkan kepada Departemen Agama. Sementara untuk tata hubungan internal agama diserahkan kepada umat sendiri. Di sanalah peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU menjadi sangat penting. Negara secara objektif semestinya berhubungan dengan umat melalui perwakilannya, baik di partai atau di organisasi keagamaan. Berbagai keperluan umat agar mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan keyakinannya, diurus dan dikomunikasikan melalui badan-badan tersebut. Dengan pemaknaan

seperti itu setiap upaya sekularisasi bagi sebuah negara yang plural seperti Indonesia, buat saya adalah niscaya. Apalagi untuk kondisi saat ini.

Mengapa saat ini Anda merasa sekularisasi begitu penting untuk kondisi Indonesia?

Ya karena dalam perkembangannya kita melihat bahwa campur tangan agama ke dunia publik, secara perlahan tetapi pasti, mulai tak terkendali. Ini karena kita membiarkan Islam menjadi hanya pada simbol dan politik. Padahal seharusnya kita bersikukuh pada Islam yang substantif yang di dalamnya justru termuat nilai-nilai pluralisme, kesetaraan antara manusia, berlomba untuk hal yang baik bagi kemanusiaan dan seterusnya. Contoh sederhana adalah soal seragam sekolah. Seragam sekolah semula diciptakan untuk mengeliminasi perbedaan antar-status sosial warga, suku, ras, dan agama. Tapi tiba-tiba seragam telah dititipi atribut agama atas nama pengajaran moral bagi anak didik. Saya bukan tidak setuju dengan pendidikan moral, budi pekerti, tetapi bagi saya pendidikan moral di sekolah harusnya yang memiliki nilai-nilai universal dan berlaku umum, tidak didasarkan pada salah satu pandangan mazhab dalam fikih. Mengajarkan tentang kebersihan, kejujuran, sopan-santun, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati perempuan, hal-hal tersebut lebih substantif dan berlaku umum ketimbang mewajibkan anak perempuan memakai rok panjang atau anak laki-laki memakai baju koko di hari Jumat. Kalau menghendaki bahwa penggunaan baju itu diberi nilai-nilai agama, mengapa tidak pada yang substansinya. Misalnya memenuhi nilai-nilai kebersihan, kepantasan, jauh dari *riyâ'* (pamer) dan sombong.

Katakanlah sebagai mayoritas kita ingin agar cara berpakaian tetap bersumber dari nilai-nilai *fiqhiyah*. Mengapa kita tidak mencari pandangan

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya.

yang lebih moderat, misalnya batas-batas aurat dari mazhab Hanafi yang cukup di bawah dengkul. Jadi dengan menggunakan rok seperti itu, bagi anak-anak Muslim telah memenuhi tuntutan fikih, bagi kelompok lain tak merasa ada pemaksaan mengikuti keyakinan orang lain. Substansinya adalah mereka menggunakan seragam dengan tetap Islami, sopan, memenuhi nilai-nilai kepantasan dan bisa digunakan oleh semua siswa apapun latar belakang agamanya. Dari segi praktisnya rok di atas mata kaki justru memudahkan anak-anak perempuan untuk bergerak sesuai dengan perkembangan kejiwaannya sebagai remaja. Sekolah umum menurut pandangan saya seharusnya mengutamakan sebuah “ruang” di mana persamaan menjadi pengikat warga belajar dan seragam sekolah adalah salah satu medianya. Namun ketika seragam kemudian diintervensi oleh salah satu pandangan agama yang bersifat mengikat, yang secara nyata membedakan warga belajar berdasarkan keyakinannya, maka dalam hal ini saya merasa membutuhkan penjelasan.

Bukankah dulu Orde Baru juga melakukan hal yang sama, memaksakan siswa untuk tidak menggunakan jilbab? Bukankah ini juga pemaksaan?

Itu jelas berbeda. Orde Baru melakukan pemaksaan untuk tidak menggunakan sesuatu yang diyakini siswa. Sementara sekarang anak-anak dipaksa untuk memakai sesuatu yang belum tentu mereka yakini. Ketika para siswa dengan sukarela memakai jilbab, siswa lainnya masih punya pilihan individu. Sebab ini adalah pilihan kesadaran. Negara jelas tidak boleh melarang seseorang menjalankan keyakinannya. Tetapi dalam hal penggunaan rok panjang atau bahkan jilbab di hari Jumat, ini adalah bentuk pemaksaan yang dilakukan sebuah peraturan untuk sesuatu yang belum tentu diyakini siswa atau orang tuanya. Ketika Jilbab dilarang, saya berteriak dan menyatakan itu melanggar HAM. Begitu juga ketika rok panjang dipaksakan, saya juga berteriak karena itu juga pelanggaran. Pada kasus pertama (penggunaan jilbab) dasarnya adalah pelanggaran atas keyakinan, sementara penggunaan rok panjang dasarnya adalah paksaan atas nama peraturan. Bagi saya keduanya sama-sama paksaan: yang pertama, paksaan untuk membuka (kasus Orde Baru); yang kedua, paksaan untuk menggunakan. Padahal, dalam ibadah harusnya tidak ada paksaan!

Ada hal lain yang jauh lebih bermasalah. Ketika pelarangan atas penggunaan jilbab terjadi, kita bisa berteriak atas nama HAM. Tetapi ketika anak kita dipaksa untuk menggunakan rok panjang dan jilbab, kita tidak bisa berteriak lagi. Sebab, sangsinya kita dianggap melawan Tuhan atau minimal melawan aturan agama. Ketika jilbab dilarang, kalangan aktivis HAM dan agama bahu-membahu untuk melawan peraturan negara yang represif itu. Tetapi, sekarang ketika pemakaian penggunaan rok dilakukan, secara horisontal warga negara harus berhadapan-hadapan antara yang pro dan yang kontra. Lebih dari itu, agama kemudian menjadi unsur yang memaksa, menjadi tiran. Sebagaimana diungkapkan oleh kalangan ibu-ibu “gedongan” tadi. Ketika agama melakukan intervensi terhadap kepentingan-kepentingan publik yang di dalamnya terdiri dari pelbagai agama dan kepentingan, sebenarnya pada saat itu agama telah menciderai akal sehat atau malah telah memberangus akal sehat.

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya.

Selain persoalan itu, apalagi yang mendasari mengapa sekularisasi penting bagi Indonesia?

Momentum paling baru yang memicu kegelisahan orang dan kemudian mulai memikirkan lagi perlunya sekularisasi adalah ketika terjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU-APP). Telah saya katakan, kalangan yang menolak RUU APP seperti saya, bukan datang dari kelompok yang tidak beragama, kami umumnya berasal dari keluarga Muslim yang terdidik dan tidak keberatan anak kami atau keluarga, bahkan diri sendiri, mengenakan jilbab sebagai pilihan keyakinan. Namun ketika aturan-aturan agama tersebut dipaksakan masuk ke dalam domain publik, kita menjadi tidak punya

pilihan. Padahal agama sendiri memberikan pilihan. Pada akhirnya kami merasa bahwa akal sehat kita tidak lagi bisa digunakan. Spiritualitas kita dipasung dan dikendalikan orang lain. Bagaimana bisa menjalankan keyakinan begitu saja disamakan dengan mengurus KTP? Inilah model bermasyarakat yang kita kehendaki?

Sementara itu di daerah-daerah muncul perda-perda yang tendensinya mengatur persoalan-persoalan privat yang dasarnya adalah penafsiran fikih yang masih mengidap *khilâfiah*. Perda tentang kewajiban menjalankan salat secara berjamaah, atau kewajiban menggunakan jilbab atau menggunakan kemampuan baca tulis al-Quran sebagai syarat untuk masuk tingkat SD atau SMP, misalnya, pada titik ini saya melihat bahwa keindonesiaan kita memang sedang mendapat ancaman dari tiadanya demarkasi yang jelas antara wilayah privat agama dengan wilayah publik negara. Pada sisi ini, menurut saya, sekularisasi bagi Indonesia menjadi niscaya.

Dalam konteks Indonesia mengapa hal seperti ini muncul? Bukankah dari dulunya kita telah menetapkan Indonesia menjadi negara yang memang tidak berbasiskan agama?

Menurut saya, salah satu akar persoalannya adalah karena rezim Orde Baru gagal membuktikan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia berhasil dengan merata. Satu hal yang sangat penting dalam ruh Islam adalah adanya panggilan untuk mengatasi krisis, untuk berjihad melawan kezaliman. Namun, ketika Orde Baru gagal, muncul kembali gagasan-gagasan untuk berjihad. Celaknya, jihad tersebut bukan dengan mengatasi krisis; tetapi dengan menawarkan ideologi Islam sebagai solusi.

Sangat menarik bahwa pada mulanya Soeharto sangat enggan bekerjasama dengan kalangan agama. Namun dalam dekade kedua dan ketiga dari pemerintahannya, Soeharto kemudian makin mendekati kepada kelompok Islam. Tampaknya, ini merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dengan ongkos murah. Soeharto memilih bermain mata dengan kelompok mayoritas agama yang ada di mesin birokrasi. Golkar yang sebagian besar di-*support* oleh kalangan Islam terdidik segera menjadi *the ruling class*. Sayangnya, kesempatan ini tidak digunakan oleh mereka untuk menunjukkan penyelenggaraan negara yang bersih yang didasarkan pada nilai-nilai substantif Islam. Sebaliknya Islam hanya dihadirkan pada

simbolnya, cangkangnya dan semata-mata kemudian digunakan sebagai kendaraan politik.

Kelalaian kalangan Islam birokrat yang sebagian besar berasal dari organisasi kemahasiswaan seperti HMI ini kemudian dimanfaatkan kelompok fundamentalis untuk menawarkan Islam ideologi sebagai solusi atas berbagai krisis di negeri ini. Sementara di wilayah non formal, mereka masuk ke relung-relung wilayah kerja organisasi kemasyarakatan Islam yang selama ini digarap NU dan Muhammadiyah. Terbukanya hubungan mesra antara negara (rezim Orde Baru) dengan kalangan agama, yang dalam periode berikutnya berlanjut dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden, menyebabkan umat

terbengkalai, sementara tokoh-tokohnya asyik dengan agendanya masing-masing. Kita mungkin masih ingat pernyataan salah satu pelaku peledakan Bom Bali II, si Ayip dari Pamarican, Banjar, Jawa Barat. Pernyataannya jelas menunjukkan betapa dia teraniaya oleh kemiskinannya, tapi pada saat bersamaan, sekaligus mendapatkan harapan dari langit: *“Ibu, saya minta maaf, tapi seperti yang Ibu katakan, biarlah kita miskin di dunia, tapi kita akan kaya raya di akhirat”*. Buat saya itu adalah *signal* yang sangat kuat bahwa Islam

gagal memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Pimpinan agama hanya sibuk untuk meniti dan menyusun tangganya masing-masing.

Maka, tidaklah keliru jika banyak dari umat kemudian digarap kelompok lain yang menawarkan ideologi Islam dengan turunan-turunannya, seperti perda syariat Islam sebagai solusi. Dari kedekatan penguasa dengan kalangan Islam birokrat – pada rezim Soeharto, Habibie, Megawati dan sekarang SBY – inilah yang juga dimanfaatkan oleh kalangan fundamentalis Islam untuk memaksakan ideologinya agar masuk ke wilayah publik secara formal. Sebagian dilakukan dengan cara-cara represi, sebagian

Bagi saya pendidikan moral di sekolah harusnya yang memiliki nilai-nilai universal dan berlaku umum, tidak didasarkan pada salah satu pandangan mazhab dalam fikih. Mengajarkan tentang kebersihan, kejujuran, sopan-santun, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati perempuan, hal-hal tersebut lebih substantif dan berlaku umum ketimbang mewajibkan anak perempuan memakai rok panjang atau anak laki-laki memakai baju koko di hari Jumat.

lain dilakukan dengan cara yang lebih santun seperti melalui partai politik atau dengan cara-cara yang bisa dikatakan sah secara demokratis.

Dengan pendekatan represi itu di satu pihak, dan pemaksaan ideologi dilakukan atas nama Tuhan di pihak lain, kita, umat Islam yang berada di luar itu, kemudian sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya, beradu argumen atau berdialog. Di daerah-daerah kita dikejutkan oleh terbitnya berbagai perda yang *aneh bin ajaib*. Atau muncul jargon-jargon yang menunjukkan watak primordial dan *minority complex* Islam seperti menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Karena itu, akal kita seperti dipasung sebab, seperti dalam sulap, kita tiba-tiba dipaksa untuk menerima logika bahwa perda-perda, seperti perda anti-maksiat, diyakini bisa menjadi solusi ampuh untuk berbagai krisis di negeri ini. Berhadapan dengan kenyataan ini akal sehat kita terbang entah ke mana. Kita tidak punya ruang untuk bertanya atau mendiskusikannya. Wilayah agama dianggap sebagai wilayah sakral, dan karenanya dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dipertanyakan, apalagi digugat. Padahal beberapa peraturan tersebut, kalau pun dikaitkan dengan aturan agama, sama sekali tak menyentuh esensi persoalan krisis yang dihadapi Indonesia dewasa ini.

Ini semua, menurut saya, membuat Indonesia, bagaimanapun juga, harus mengambil langkah-langkah sekularisasi. Artinya, kembalikanlah persoalan-persoalan agama ke dalam wilayah privat, individu. Di wilayah publik, kalau pun mau, kita hanya mengambil esensinya. Dalam bahasa metodologi pembacaan teks, kita hanya mengambil yang *qath'î*-nya, bukan yang *zhanni*. Kita mengambil yang universalnya, bukan yang partikularnya. Atau, kita menebar garamnya, bukan memaksakan jenis dan bentuk masakannya. Itulah hakikat sekularisasi dan dasar perlunya sekularisasi di Indonesia.

Tetapi apakah nantinya sekularisasi itu akan mematikan agama?

Abdul Karim Soroush, professor tamu di lembaga internasional untuk kajian Islam di Belanda-ISIM, dulunya adalah seorang fundamentalis yang sangat percaya pada Islam ideologi. Dia adalah pendukung kuat revolusi Islam di Iran. Khomeini sendiri yang melantiknya sebagai anggota Dewan Revolusi Kultur Islam. Sekarang setelah melihat perkembangan di tanah airnya, ia berpendapat bahwa negaranya memerlukan sekularisasi demi

“melindungi agama dan spiritualitas dari permainan dan kepentingan politik”.

Melihat pengalaman dan sejarah di tanah air kita saat ini, tidak bisa lain saya sepenuhnya setuju dengan Soroush. Bagi saya, sepanjang masih ada umat manusia, spiritualitas agama tidak akan pernah mati. Yang justru mendesak untuk dilakukan adalah sejauh mungkin agama mengambil jarak dari negara. Mengambil jarak yang jauh tak berarti agama mati, sebaliknya mendekat, bahkan menempelpun, belum tentu hidup. Sekularisasi adalah pilihan. Sekularisasi dapat dijadikan jawaban dan penyelesaian bagi sebuah masyarakat yang plural.

Sekularisasi memang memisahkan antara wilayah publik dan kemasyarakatan sebagai wilayah sekular. Di dalamnya tidak ada aturan-aturan yang mengikat warga yang secara langsung berkaitan dengan keimanan seseorang. Bahwa kemudian seseorang menggunakan keyakinannya untuk menjalankan atau tidak menjalan-

kannya, hal itu terpulang kepada yang bersangkutan. Misalnya, seseorang tidak berbuat korupsi pada dasarnya disebabkan karena dia tahu korupsi adalah melanggar hukum. Mengambil hak warga lain adalah perbuatan salah secara hukum. Tapi bahwa dia mendapatkan semangat untuk tidak korupsi dari keimananya karena takut berbuat dosa, itu sah-sah saja.

Jadi, meskipun gagasan sekularisasi untuk Indonesia dipermasalahkan atau dipertanyakan oleh kelompok lain, bagi saya ini adalah sebuah keharusan. Dengan sekularisasi bukan berarti urusan umat dan kebutuhannya lalu diabaikan. Sebaliknya, urusan umat bahkan bisa menjadi transparan, terang dan jelas. Contoh sederhana adalah dalam urusan ibadah haji. Tadi saya sudah menjelaskan Departemen Agama adalah perpanjangan negara untuk mengatur kebutuhan umat dalam kenyamanan beribadah. Di sini

Bagi saya, sepanjang masih ada umat manusia, spiritualitas agama tidak akan pernah mati. Yang justru mendesak untuk dilakukan adalah sejauh mungkin agama mengambil jarak dari negara. Mengambil jarak yang jauh tak berarti agama mati, sebaliknya mendekat, bahkan menempelpun, belum tentu hidup. Sekularisasi adalah pilihan. Sekularisasi dapat dijadikan jawaban dan penyelesaian bagi sebuah masyarakat yang plural.

gagasan sekularisasi dalam mengurus manajemen haji dapat menerangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan umat untuk berhaji: bagaimanaangkutannya, pemondokannya, mengurus visa negara lain (Arab Saudi), *catering*, dan lain-lain. Semuanya adalah urusan manajemen yang didalamnya membutuhkan pendekatan dan perangkat sekular seperti komputer, bahasa, pesawat terbang, visa, dan sebagainya. Dengan pendekatan sekular ini persoalan haji bisa dibicarakan secara rasional, mengevaluasinya secara terukur dan objektif. Ini contoh sederhana bagaimana cara-cara sekular digunakan meskipun untuk urusan ibadah. Kalau tidak dikelola secara sekular, maka kejadiannya seperti peristiwa kelaparan di Mina, sebagaimana peristiwa haji tahun lalu, di mana umat diminta untuk bersabar dengan mengatakan, “ini ujian dari Tuhan”, padahal jelas-jelas ini adalah kebobrokan dalam pengelolaan haji. Kedunguan dalam urusan *catering* diselesaikan dengan perintah untuk bersabar dan larangan untuk bersakwasangka. Atas nama ibadah kita dilarang mempertanyakan cara kerja Departemen Agama. Ini merupakan pembodohan yang luar biasa.

Contoh lain adalah dalam kurikulum ekstra-sekolah. Saya menyekolahkan anak saya ke sekolah umum. Selain murah, saya berharap anak saya bisa bersikap toleran karena siswanya relatif beragam. Di sana ada Muslim, Kristen, Hindu, Budha, Tionghoa atau etnis lain. Namun belakangan ini anak saya wajib mengikuti pembacaan al-Quran selama 15 menit sebelum kelas dimulai. Saya sangat heran, mengapa sekolah umum mengurus anak bisa ngaji atau tidak. Itu bukan urusan sekolah; bukan urusan publik. Itu urusan keluarga; urusan privat. Berbeda kasusnya kalau anak saya disekolahkan ke sekolah Islam (dan swasta).

Saya adalah alumni IAIN (sekarang UIN Jakarta), jadi Anda tak perlu meragukan saya. Bagi saya kalau anak saya mau belajar membaca al-Quran itu bukan menjadi kewajiban sekolah, melainkan kewajiban saya, orang tuanya. Paling jauh itu menjadi kewajiban komunitas dengan menyediakan Taman Pengajian al-Quran. Ketika saya tanyakan kepada pihak sekolah, mereka mengatakan dengan membaca al-Quran anak didik diharapkan akan menjadi anak yang saleh dan mempunyai budi pekerti. Tapi bagaimanakah anak didik akan melakukan itu, sementara yang diwajibkan membaca adalah anak-anak dengan latar belakang Muslim, anak lain bagaimana? Katakanlah jawabannya adalah agama lain pun diwajibkan membaca kitabnya. Tapi

bagaimanakah dari agama yang berbeda-beda diharapkan akan keluar sebuah etika yang sama yang bisa berlaku umum tanpa melalui proses yang mengakui kesamaan di antara agama-agama itu? Bukankah kita menganggap Islam adalah agama paling benar? Demikian juga dengan agama yang lainnya. Terlebih, karena anak-anak kita yang Muslim hanya membaca tanpa memahami maknanya. Jadi, kesalehan dan budi pekerti macam apa yang diinginkan lahir dari anak yang sama sekali tidak paham dengan apa yang dibacanya? Jika anak diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok atau tidak melakukan tindakan kekerasan, saya mengerti itu adalah bagian dari penerapan ajaran budi pekerti. Jika anak diminta untuk tidak berbuat aniaya kepada sesama, murid laki-laki tidak melecehkan murid perempuan, tidak bolos atau tidak berdusta, saya mengerti bahwa itu adalah penjabaran dari konsep anak saleh. Tetapi jika anak didik diwajibkan membaca al-Quran, lalu diharapkan menjadi anak yang berdisiplin, saleh dan berbudi pekerti, saya sama sekali tidak paham! Maaf, saya tak bisa melihat hubungannya!

Pesantren memiliki sumber daya yang luar biasa berupa santri-santri dan pengasuhnya yang kemudian ketika bergaul atau masuk lembaga pendidikan di luar pesantren mereka sanggup menafsirkan pandangan-pandangan dari bawah dengan perspektif baru, yakni dengan perspektif keadilan jender. Hasilnya adalah sekumpulan produk pemikiran keagamaan yang sangat progresif jika dibandingkan dengan kelompok Islam dari dunia yang lain. Ini sebetulnya kekuatan yang luar biasa bagi gerakan perempuan Islam di Indonesia.

Sebagai seorang aktivis perempuan, problem apa sebetulnya yang Anda anggap paling berat untuk terus diperjuangkan?

Saya melihatnya begini: dalam situasi global saat ini, sebagaimana kita semua tahu, kita berhadapan dengan sikap negara-negara adidaya yang begitu arogan dan mengabaikan realitas ketertindasan negara-negara berkembang, terutama dunia Islam. Melihat realitas yang demikian, kita seperti melihat orang adu tarik-tambang. Di satu pihak negara adidaya

yang begitu arogan, mendiktekan kemauannya sendiri, memberlakukan standar ganda, mengontrol dan mencurigai negara lain sementara negara sendiri sewenang-wenang. Di sisi lain, terutama kelompok Islam pada kenyatannya begitu tidak berdaya dari sisi apapun, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, SDM dan seterusnya. Umat Islam di mana-mana mengalami kolonialisme (baru) dalam bentuknya yang lain. Bagaimana kita dapat melihat keadilan dalam struktur dunia yang timpang seperti ini? Sementara itu, dari kelompok-kelompok yang kalah ini, tampaknya hanya kegilaan kelompok fundamentalis saja yang dapat mengimbangi dominasi negara adidaya tersebut. Melihat arogansi negara adidaya dan lemahnya negara-negara Muslim, saya hanya bisa mencoba mengerti, meskipun dengan sangat sedih, bahwa untuk menghadapi kegilaan negara *super power* itu ternyata hanya bisa dengan sikap militan, sikap fundamentalis.

Lantas di manakah posisi kelompok perempuan? Kelompok perempuan sebetulnya berada di antara dua posisi yang tarik-menarik ini. Persis sama dengan pola di atas: di satu pihak ada masyarakat dunia yang patriarkal, yang di dalamnya bercokol ideologi liberal yang menempatkan perempuan sebagai objek. Perempuan adalah komoditas sekaligus target pasar. Kehadiran perempuan dianggap penting bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan ekonomi global dan kapitalisme. Agar mereka bisa *survive* dan mampu bersaing di dunai publik yang patriarkal, mereka dituntut menjadi warga dunia dengan pendekatan maskulin; sanggup melakukan ekspansi, penaklukan, adu otot dan kekuatan, mengesampingkan nilai-nilai kelembutan dan seterusnya. Dengan cara berpikir seperti itu, bahkan rahim perempuan juga harus dikendalikan. Tujuannya adalah produktivitas. Beranak pinak dianggap sebagai penghambat produktivitas. Keluarga sejahtera diukur dari seberapa kecil keluarga itu. Kelompok liberal ini memosisikan perempuan sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi. Mereka sangat berkepentingan dengan rahim perempuan. Kaum perempuan dituntut untuk membatasi kelahirannya agar ongkos produksi rendah dan produktivitas tetap tinggi sebagai tenaga kerja yang murah.

Di pihak lain, kaum perempuan berhadapan dengan cara pandang dan kelompok fundamentalis yang juga menganut ideologi patriarkal. Perempuan bagi kelompok ini adalah eksistensi dan harga diri mereka. Karena yang dianggap sang musuh adalah modernisasi yang mewujud dalam hal-hal yang serba Barat, maka perempuan menjadi rentan ketika dikaitkan

dengan hal-hal yang dianggap Barat. Pendidikan, misalnya, pada mulanya adalah personifikasi Barat. Pendidikan, pada masa penjajahan dianggap monster yang dapat merusak kemurnian perempuan. Rusaknya kemurnian perempuan sama dengan hancurnya Islam. Akibatnya dengan berbagai cara perempuan mengalami pemingitan dalam modus dan bentuk yang berbeda-beda. Dimulai dari pembatasan ruang gerak, seperti pembatasan untuk bicara, sampai pembatasan untuk masuk dan bergerak di ruang publik sebagai pemimpin. Namun dalam waktu yang bersamaan, kalangan fundamentalis sangat paham bahwa keberadaan mereka tergantung benar kepada keberadaan kaum perempuan. Melalui perempuanlah anggota mereka bisa bertambah baik dengan cara banyak melahirkan atau memperbanyak istri-istri. Kelompok fundamentalis memperlakukan perempuan sebagai kelompok yang homogen, yang dalam bayangan mereka dianggap sebagai satu-satunya harapan masa depan kelompok ini.

Dengan mengeskplotasi rahim serta melalui perannya sebagai seorang ibu, perempuan diterima kehadirannya. Jadi, ada dua kelompok besar yang secara bersamaan menghimpit perempuan demi kepentingan mereka masing-masing. Ini adalah situasi global yang sedang dihadapi oleh kelompok perempuan.

Indonesia, bagaimanapun juga, harus mengambil langkah-langkah sekularisasi. Artinya, kembalikanlah persoalan-persoalan agama ke dalam wilayah privat, individu. Di wilayah publik, jika pun mau, kita hanya mengambil esensinya. Dalam bahasa metodologi pembacaan teks, kita hanya mengambil yang *qathî*-nya, bukan yang *zhannî*. Kita mengambil yang universalnya, bukan yang partikluarnya. Atau, kita menebar garamnya, bukan memaksakan jenis dan bentuk masakannya. Itulah hakekat sekularisasi dan dasar perlunya sekularisasi di Indonesia.

Jika demikian rentannya posisi perempuan, kemudian apa tawaran Anda agar perempuan bisa keluar dari himpitan seperti ini?

Saya tidak punya resep yang yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kita harus melihatnya dalam konteks yang berbeda-beda. Tetapi,

saya kira, kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Feminisme sebagai ideologi sekaligus gerakan kesadaran tentang hak-hak perempuan barangkali bisa menjadi tawaran. Tapi sekali lagi tidak bisa digeneralisasi. Ada yang menyimpulkan bahwa gerakan perempuan Islam di Indonesia jauh lebih baik daripada kelompok feminis di negara berpenduduk Muslim lainnya. Dalam beberapa hal saya setuju dengan pendapat itu. Penyebabnya barangkali karena, *pertama*, Islam Indonesia adalah Islam perifer yang jauh dari pusatnya. Oleh karena itu, kita punya kebebasan yang cukup besar untuk menginterpretasikan apa itu Islam dan bagaimana peran perempuan dalam corak Islam seperti itu. *Kedua*, secara kultural kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa sanggup menyerap ajaran-ajaran Islam tanpa bisa lagi memisahkannya. Artinya, kita tidak lagi bisa membedakan antara kultur dengan ajaran agama, karena keduanya sudah menyatu.

Ketiga, kita memiliki tradisi pesantren yang bukan hanya memiliki bangunan fisik di mana anak lelaki dan perempuan dididik dan ditumbuhkan, tetapi juga bangunan teologi yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang masih terbuka untuk dibaca ulang demi penegakan hak-hak perempuan. Pesantren memiliki sumber daya yang luar biasa berupa santri-santri dan pengasuhnya yang kemudian ketika bergaul atau masuk lembaga pendidikan di luar pesantren mereka sanggup menafsirkan pandangan-pandangan dari bawah dengan perspektif baru, yakni dengan perspektif keadilan jender. Hasilnya adalah sekumpulan produk pemikiran keagamaan yang sangat progresif jika dibandingkan dengan kelompok Islam dari dunia yang lain. Ini sebetulnya kekuatan yang luar biasa bagi gerakan perempuan Islam di Indonesia.

Keuntungan lain, kita memiliki ormas keagamaan yang anggotanya ribuan perempuan dari desa sampai ke kota. Ini potensi yang luar biasa. Orde Baru pernah memanfaatkan mereka untuk menyebarkan gagasan dan program pembangunan. Jadi, betapa kekuatan mereka sangat dahsyat. Ingat kasus ditinggalkannya Aa Gym oleh jamaahnya. Gara-gara melakukan poligami, ia benar-benar mati langkah. Itu semua adalah kerjaan ibu-ibu anggota majelis taklim yang merasa Aa Gym telah menzalimi perempuan, bukan kerjaan kami yang terus berkutat dengan penafsiran ulang ayat poligami.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah karena kita menjadi periferan maka kita sulit menjadi pusat. Kita, sejauh ini, tidak pernah memberi alternatif kepada dunia. Sejauh ini kita belum bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam Indonesia berbeda dan lebih baik ketimbang Islam di negara lainnya dalam menempatkan kaum perempuan, meskipun Indonesia juga sedang diserang oleh *transnational fundamentalism*. Sejauh ini kita belum bisa menjadi *role mode* dunia Islam internasional.

Mungkin kita mempunyai problem bahasa. Dari sejarahnya, kita adalah jajahan Belanda, bukan jajahan Inggris. Jadi, kita bukan bagian dari negara Persemakmuran seperti India, Pakistan, Bangladesh yang kemudian mendapatkan keuntungan secara peradaban karena mereka mempunyai tradisi berbahasa yang laku di dunia internasional.

Indonesia adalah negara dengan kemajemukan yang luar biasa. Untuk itu, hendaknya pluralisme menjadi keniscayaan bagi negara ini. Dalam pandangan Anda, bagaimana seharusnya pluralisme dipahami dalam konteks keindonesiaan? Apakah ia mengarah pada sinkretisme – yang cenderung menyamakan kebenaran semua agama, sebagaimana dituduhkan MUI – dan relativisme?

Ada yang menyimpulkan bahwa gerakan perempuan Islam di Indonesia jauh lebih baik daripada kelompok feminis di negara berpenduduk Muslim lainnya. Dalam beberapa hal saya setuju dengan pendapat itu. Penyebabnya barangkali karena, *pertama*, Islam Indonesia adalah Islam periferan yang jauh dari pusatnya. Oleh karena itu, kita punya kebebasan yang cukup besar untuk menginterpretasikan apa itu Islam dan bagaimana peran perempuan dalam corak Islam seperti itu. *Kedua*, secara kultural kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa sanggup menyerap ajaran-ajaran Islam tanpa bisa lagi memisahkannya.

Artinya, kita tidak lagi bisa membedakan antara kultur dengan ajaran agama, karena keduanya sudah menyatu. *Ketiga*, kita memiliki tradisi pesantren yang bukan hanya memiliki bangunan fisik di mana anak lelaki dan perempuan dididik dan ditumbuhkan, tetapi juga bangunan teologi yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang masih terbuka untuk dibaca ulang demi penegakan hak-hak perempuan.”

Pluralisme, menurut saya, menjadi sangat penting ketika saat ini muncul *euforia* lokalitas. Yakni ketika Indonesia dari era reformasi ke era otonomi daerah masyarakatnya semakin menganggap bahwa genuinitas identitas dan lokalitas merupakan hal yang sangat penting. Identitas kelokalan kemudian diukur dari darah, bahasa, agama dan suku. Semua ini dijadikan ukuran genuinitas suatu wilayah yang ditonjolkan untuk kepentingan dua hal: pertama kekuasaan; dan kedua akses pada sumber ekonomi. Dalam rangka kepentingan ini, lokalitas kemudian menjadi isu primordial. Semula isunya adalah bebas dari dominasi Jawa, karena itu otonomi daerah menjadi penting. Tetapi pada saat yang bersamaan momen ini dimanfaatkan untuk mendapatkan akses kepada kekuasaan dan ekonomi, atau sebagai alasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta.

Dalam konteks inilah kemudian pluralisme – oleh mereka yang memiliki kepentingan (politik dan ekonomi) tertentu—dianggap sebagai ancaman, terutama terkait dengan otonomi daerah. Ini yang pertama. Kedua, terkait dengan munculnya kelompok *transnational Islamic fundamentalism*. Islam fundamentalis, dalam pandangan saya, cenderung mengabaikan keragaman. Jadi semuanya ingin dijadikan satu dan diseragamkan dalam tradisi teologi tertentu, misalnya Wahhabisme.

Politik Orde Baru pada masa lalu adalah politik yang anti-keragaman, sehingga kemudian dikenal ada politik SARA. Pada masa Orde Baru kepelbagaian menjadi persoalan karena di dalamnya mengandung kemungkinan berbeda pendapat. Dari sisi kepentingan Orde Baru, berbeda pandangan dan pendapat adalah ancaman, karenanya harus ditekan. Ketika kepelbagaian ditekan sedemikian rupa, kita lalu merasa seolah-olah tidak punya masalah dengan kepelbagaian itu. Kepelbagaian dikelola oleh rezim Orde Baru melalui kebijakan politik hubungan antar-agama atau politik kerukunan antar-umat beragama di tingkat elit. Sementara di tingkat bawah, di era Orde Baru, hal tersebut ditekan oleh kekuatan tentara dan tidak diperbolehkan untuk muncul.

Setelah Orde Baru, kemudian muncul ide otonomi daerah, di mana pada waktu yang bersamaan identitas kelompok atau daerah juga mulai dimunculkan. Kenapa identitas lantas dibicarakan? Sebagaimana saya sering katakan, ini adalah terkait dengan akses. Orang Papua kembali menonjolkan identitasnya karena dengan cara seperti itu mereka bisa menjadi

gubernur, bupati, camat, dan lain sebagainya. Orang-orang dari daerah lain juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini kepelbagaian muncul lagi, tetapi dengan semangat primordial. Kemunculannya sarat dengan muatan politik dan bukan sebagai upaya untuk memahami realitas masyarakat yang plural.

Jadi orang bersikap mendua terhadap realitas masyarakat yang majemuk ini. Di satu pihak dianggap berkah, namun di lain pihak dianggap ancaman. Ancaman bagi siapa? Kalau pada masa Orde Baru kepelbagaian adalah ancaman bagi kesatuan politik Orde Baru; sementara saat ini kepelbagaian dianggap sebagai ancaman bagi kelompok Islam yang kita sebut sebagai kelompok fundamentalis.

Pluralisme, menurut saya, menjadi sangat penting ketika saat ini muncul *euforia* lokalitas. Yakni ketika Indonesia dari era reformasi ke era otonomi daerah masyarakatnya semakin menganggap bahwa genuinitas identitas dan lokalitas merupakan hal yang sangat penting.

Jadi, kalau Anda menanyakan bagaimana kita menghadapi ini semua, maka bagi saya, kita harus kembali pada sejarah awal kenapa kita sepakat membentuk republik ini. Sebetulnya konsep Bhinneka tunggal ika merupakan kristalisasi dari pemahaman tentang pluralitas Indonesia. Kenyataannya kita terdiri dari berbagai suku, bahasa dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi kemudian pluralisme dianggap sebagai monster. Kehadirannya mengancam kepentingan kelompok yang diuntungkan oleh gagasan otonomi daerah dan kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa Indonesia adalah negara Islam; dan Islam adalah satu. Dengan begitu, keragaman adalah ancaman bagi dua kelompok ini.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa dengan keragaman ini agama kita kemudian akan sama benarnya dengan agama Kaharingan, misalnya. Tetapi pokok yang ingin saya katakan adalah bahwa realitas negara kita sangatlah plural. Kesadaran inilah yang harus ditumbuhkan lagi di Indonesia. Ketika saya kecil, pelajaran mengenai peta bumi Indonesia dengan segala macam ragam budayanya itu harus dihafal, sehingga kita waktu itu tahu wilayah-wilayah geografi Indonesia. Tapi coba tanya anak-anak sekarang apakah mereka tahu wilayah-wilayah atau daerah-daerah di Indonesia yang beragam ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebetulnya telah

melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Baru. Hanya saja kalau dulu pelakunya adalah rezim Orde Baru dan militer, sekarang yang melakukan adalah diri kita sendiri, umat Islam.

Menurut saya, tidak bisa lain harus ada kesadaran dari kelompok mayoritas, yakni kelompok Muslim mengenai keragaman ini. Kita tidak bisa berharap kepada kelompok minoritas untuk selalu bersuara bahwa mereka ada. Jika kelompok mayoritas menyadari adanya keragaman, maka kemudian harus ada ruang bersama, di mana semua unsur bisa masuk ke dalamnya. Untuk itu jalan yang bisa kita pakai, dan ini bagi saya merupakan jalan satu-satunya yang paling mungkin, adalah sekularisasi demi menghormati keragaman tersebut.

Terkait dengan terus bermunculnya persoalan-persoalan yang tidak kalah rumitnya seperti trafficking, apakah tindakan yang diambil oleh negara saat ini sudah bisa dikatakan memihak pada perempuan?

Apabila kita cermati, memang mulai ada perhatian dari pihak-pihak terkait. Setidaknya sudah ada usaha ke arah sana, walaupun itu melalui *bargaining* politik. Kita melihat sudah ada Undang-Undang Anti-kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Anti-Trafiking, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihatnya dari segitiga penerapan hukum, maka kita tidak bisa hanya melihat dari *content of law*, melainkan juga harus sekaligus melihat dari *structure of law* dan *culture of law*. Kalau budayanya masih menganggap bahwa perempuan adalah subordinat, oleh karena itu perempuan dibayar lebih murah daripada laki-laki, perempuan hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, atau perempuan dianggap sebagai objek seks belaka, maka usaha pembelaan terhadap perempuan akan tetap sulit dilakukan.

Tetapi saya ingin lebih optimis dalam melihat persoalan ini. Kita memang harus melakukan pendekatan multidimensi untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, kita benar-benar tidak bisa hanya berharap pada negara. Sebab dalam konteks ini, menurut saya, *civil society* berperan besar dalam upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan atau upaya penyadaran pada perempuan. Dan yang saya suka adalah akal publik ternyata memunyai kewarasan untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk. Kembali kita mengambil kasus Aa Gym. Saya melihat itu murni

akal publik perempuan yang melakukan penghakiman terhadap sebuah tindakan yang dirasa tidak adil bagi mereka, di mana agama ditafsirkan secara sepihak oleh laki-laki seperti Aa Gym. Sehingga akal publik perempuan tetap menilainya sebagai tindakan tidak adil. Ternyata kita tidak perlu melawan tindakan seperti Aa Gym itu dengan ayat lagi. Biar kanlah kewarasan manusia, dalam hal ini kewarasan perempuan, yang melawannya. Untuk itu yang diperlukan adalah terbukanya ruang bagi perempuan untuk belajar dan menyatakan pendapatnya.

Demikian juga dengan kasus RUU-APP. Menurut saya, yang menjegal isu RUU-APP yang diusung oleh anggota parlemen adalah murni akal publik. Meskipun pada saat yang sama kelompok-kelompok yang setuju dengan isu tersebut mengerahkan massa, bahkan sampai mengintimidasi. Namun akal publik tetap tidak bisa dibungkam. Saya sangat percaya pada akal publik. Dan akal publik akan tetap waras kalau kita sudah sanggup memisahkan antara domain agama yang bersifat privat dengan domain publik. Hal inilah yang seharusnya diperjuangkan terus-menerus. Sebab hal ini merupakan kebutuhan bagi Indonesia.

Negara secara objektif semestinya berhubungan dengan umat melalui perwakilannya, baik di partai atau di organisasi keagamaan.

Berbagai keperluan umat agar mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan keyakinannya, diurus dan dikomunikasikan melalui badan-badan tersebut. Dengan pemaknaan seperti itu setiap upaya sekularisasi bagi sebuah negara yang plural seperti Indonesia, buat saya adalah niscaya.

Bagaimana dengan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti kerap terjadi pada wilayah domestik yang demikian sulit untuk diangkat pada tingkat hukum, begitu pula rumitnya isu trafficking dan sebagainya? Advokasi seperti apa yang mesti dilakukan oleh kelompok perempuan jika kita tidak bisa mengandalkan negara secara penuh?

Kelompok-kelompok perempuan sejauh ini tetap melakukan advokasi-advokasi untuk membela perempuan melalui Prolegnas, yakni program-program legislasi yang mendukung perempuan. Jadi, aktivis-

aktivis perempuan memberikan informasi yang seimbang kepada anggota DPR. Tetapi, seperti tadi sudah saya katakan, kita tidak bisa berharap hanya pada salah satu sudut saja dari segitiga hukum untuk melakukan perubahan. Perubahan hanya mungkin kalau dari ketiga unsur itu, yakni budaya, isi, dan struktur hukumnya berjalan bersamaan.

Capaian dalam masalah *content of law* mungkin sudah lebih baik karena sudah ada beberapa undang-undang yang memihak perempuan. Tapi untuk masalah pelaksanaannya kita masih berharap adanya dukungan entah itu dari masyarakat atau pemerintah untuk melakukan penyadaran di tingkat budaya. Meskipun *content of law*-nya sudah ada tetapi jika kemiskinan dan tingkat pendidikan yang buruk masih ada dan perempuan masih menjadi tumpuan bagi keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah maka *trafficking* masih akan terus terjadi.

Bagaimana Anda melihat masa depan Indonesia?

Mungkin sedikit pesimistik, untuk tidak mengatakan khawatir. Jika corak keislaman Indonesia semakin mengabaikan realitas keragaman, realitas kepelbagaian, dan malah menonjolkan corak Islam yang monolitik dan tidak multitasir, maka saya sangat khawatir. Sebab, kita akan kehilangan keislaman sekaligus keindonesiaan kita. Jika tidak ada lagi tradisi pesantren yang memungkinkan untuk mengembangkan tradisi kulturalnya, maka itu adalah sebuah ancaman yang luar biasa terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Kita masih melihat bahwa dalam tradisi lokal yang berkembang di pesantren terletak kemungkinan adanya ruang untuk kepelbagaian kita. Benar bahwa tradisi lokal pun sangat bisa mengancam perkembangan pemikiran yang sehat dan terbuka, karena karakternya yang cenderung feodal dan cenderung melakukan represi terhadap orang yang lemah. Tetapi, menurut saya, kearifan-kearifan mereka yang dilahirkan melalui dialektika seharusnya tidak dilibas baik oleh ekonomi liberal maupun oleh *transnational Islamic fundamentalism* yang masuk ke Indonesia dan berusaha untuk menyeragamkan corak keagamaannya. Tetapi jika negara hanya tinggal bungkam dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi hal ini, maka, bagi saya, pendapat mas Dawam benar, hal ini akan menjadi ancaman bagi keindonesiaan.

Lantas apakah masih ada harapan akan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia yang memperlakukan seluruh warganya secara adil, setara dan memihak pada minoritas dan kalangan atau warga yang terpinggirkan?

Kalau melihat perkembangan gerakan perempuan, menurut saya, masih ada harapan dan membuat kita punya alasan untuk optimis. Satu contoh, beberapa waktu lalu kami mengundang beberapa angkatan ulama Aceh untuk mendiskusikan masalah jender. Pertama-tama mereka menganggap bahwa isu ini adalah ancaman yang dihembuskan oleh Barat untuk menaklukkan Islam. Namun, kemudian setelah mereka dikenalkan dengan metodologi atau cara baca teks, di mana dengan cara seperti itu mereka bisa melihat aspek keadilan bagi orang lemah, bagi minoritas atau bagi perempuan, ternyata mereka bisa menerima dengan terbuka. Metode dialog seperti ini bisa memupus kecurigaan antar-agama, antar-suku, antar-ras, dan lain sebagainya. Dengan model dialog juga tercipta ruang-ruang untuk saling memahami. Memang kita berada dalam posisi yang sulit, oleh karena posisi kita sebagai kelompok moderat. Sebab kita menjadi tidak bisa “berantem” dengan kelompok fundamentalis yang bisa melakukan apa saja. Tetapi, bagi saya, ini adalah resiko memilih demokrasi dan memilih menjadi seorang yang moderat. Kita hanya bergantung pada kewarasan, akal sehat dan hukum yang adil dan sensitif pada kepelbagian anak negeri ini.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 23 Mei 2007